

Strategi Pendampingan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tepat Sasaran Sesuai Aturan Perundang-undangan

Mochammad Reza Kurniawan¹

Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang¹

ABSTRAK

Implementasi strategi pendampingan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat dibutuhkan agar tidak menyalahi aturan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif, pelatihan, pendampingan intensif, monitoring dan evaluasi, serta penelitian tindakan. Hasil menunjukkan bahwa metode partisipatif berhasil meningkatkan keterlibatan dan rasa tanggung jawab semua pemangku kepentingan, sementara pelatihan dan workshop memperkuat kapasitas manajemen keuangan sekolah. Pendampingan intensif memungkinkan penyelesaian masalah secara langsung dan memastikan kepatuhan terhadap rencana anggaran. Monitoring dan evaluasi memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penggunaan dana, sementara penelitian tindakan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah spesifik secara berkelanjutan. Keseluruhan strategi ini menghasilkan peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMKN Klakah. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa strategi pendampingan yang terstruktur dapat menjadi model yang efektif untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pendidikan.

Kata Kunci: *Pendampingan, Dana BOS, Transparansi, Akuntabilitas*

Corresponding Author:

Mochammad Reza Kurniawan
(mochrezakurniawan@gmail.com)

Received: June 30, 2024

Revised: July 19, 2024

Accepted: July 28, 2024

Published: August 09, 2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. BOS adalah bentuk intervensi pemerintah untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah, dengan tujuan utama membantu sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik kepada siswa. Dana BOS dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Lumajang, untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian alat tulis, biaya kegiatan ekstrakurikuler, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Namun, meskipun dana BOS telah berjalan selama beberapa tahun, pengelolaannya di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah utama yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran penggunaan dana dan kurangnya pemahaman terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kabupaten Lumajang, sebagaimana di banyak daerah lain, tantangan ini menjadi semakin kompleks mengingat berbagai faktor seperti kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pengawasan yang efektif,

serta adanya potensi penyimpangan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penggunaan dana BOS yang tidak tepat sasaran dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Lumajang. Jika dana BOS tidak dikelola dengan baik, tujuan utama dari pemberian dana ini, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, menjadi sulit tercapai. Selain itu, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peraturan juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, mulai dari kepala sekolah hingga dinas pendidikan setempat.

Untuk menjawab tantangan ini, pendampingan dalam pengelolaan dana BOS menjadi salah satu strategi penting yang harus dilakukan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOS dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Pendampingan juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman para pengelola dana, terutama kepala sekolah dan bendahara, terkait aturan perundang-undangan yang harus diikuti dalam pengelolaan dana BOS.

Pendampingan pengelolaan dana BOS yang tepat sasaran dan sesuai dengan perundang-undangan memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas pengelola dana, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi, hingga pengembangan sistem pelaporan yang efektif. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam pendampingan harus mampu menyesuaikan dengan konteks lokal, termasuk memahami kondisi dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Lumajang.

Dalam konteks Kabupaten Lumajang, upaya pendampingan yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Peran pemerintah daerah dan dinas pendidikan sangat penting dalam memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pendampingan. Di sisi lain, partisipasi aktif dari sekolah dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendampingan yang dilakukan benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah.

Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa strategi pendampingan yang dirancang harus mampu menanggapi dinamika dan perubahan kebijakan terkait dana BOS yang terus berkembang.

2. METODE

Kegiatan pengabdian dengan judul "Strategi Pendampingan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tepat Sasaran Sesuai Aturan Perundang-undangan di Kabupaten Lumajang" dapat menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi. Pendekatan partisipatif sangat cocok digunakan, karena melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah, komite sekolah, dan pemerintah daerah, dalam proses pengelolaan dana BOS. Melalui diskusi kelompok terarah dan pelatihan, semua pihak dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan dana yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, metode pelatihan juga penting untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah, bendahara, dan tim manajemen sekolah dalam mengelola dana BOS sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Modul pelatihan yang disusun secara khusus akan membantu mereka dalam memahami tata kelola keuangan sekolah dengan lebih baik. Metode ini bisa diperkuat dengan pendampingan intensif yang diberikan secara terus-menerus. Dengan adanya mentor atau konsultan keuangan, sekolah dapat menerima

bantuan langsung dalam menyusun rencana anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tepat.

Untuk memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan tujuan dan aturan, metode monitoring dan evaluasi (M&E) perlu diterapkan secara berkala. Hal ini melibatkan penetapan indikator keberhasilan dan pelaksanaan monitoring rutin untuk mengawasi penggunaan dana. Evaluasi yang dilakukan kemudian dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Terakhir, pendekatan penelitian tindakan (action research) dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengelolaan dana BOS secara langsung, melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan pengelolaan dana BOS di SMKN Klakah Lumajang menunjukkan berbagai perkembangan signifikan dalam tata kelola keuangan sekolah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi metode partisipatif, pelatihan dan workshop, pendampingan intensif, monitoring dan evaluasi, serta penelitian tindakan. Masing-masing metode ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut.

a. Partisipatif

Melalui metode partisipatif, berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS di SMKN Klakah, seperti kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan perwakilan orang tua, dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan. Hasilnya, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penyusunan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah. Misalnya, alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana belajar-mengajar ditentukan berdasarkan masukan dari guru-guru yang mengetahui kebutuhan siswa secara langsung.



Gambar 1. Pendampingan Partisipatif Penggunaan dana BOS

Pendekatan partisipatif ini juga berdampak pada peningkatan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap penggunaan dana BOS. Ketika semua pemangku kepentingan merasa terlibat, mereka menjadi lebih berkomitmen untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama. Hal ini terlihat dari peningkatan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh bendahara sekolah, yang kini lebih rinci dan mudah dipahami oleh semua pihak.

b. Pelatihan

Pelatihan yang diberikan kepada tim manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah dan bendahara, berhasil meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dana BOS secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama pelatihan, peserta mempelajari berbagai aspek pengelolaan keuangan, seperti penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaporan penggunaan dana, serta tata cara pertanggungjawaban dana BOS.

Salah satu hasil penting dari pelatihan ini adalah peningkatan kemampuan kepala sekolah dan bendahara dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS yang disediakan oleh pemerintah. Mereka menjadi lebih terampil dalam menginput data, menyusun laporan keuangan, dan melakukan verifikasi terhadap pengeluaran yang dilakukan. Kemampuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, workshop juga memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS, sehingga mereka dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan oleh sekolah lain.

c. Pendampingan Intensif

Pendampingan intensif yang dilakukan oleh mentor keuangan di SMKN Klakah memberikan dampak positif dalam pengelolaan dana BOS. Dengan adanya pendampingan langsung, sekolah dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sebelumnya sering muncul, seperti ketidakpatuhan terhadap jadwal pelaporan dan kesalahan dalam alokasi anggaran. Pendampingan ini juga membantu dalam menyusun RKAS yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah.

Pendampingan intensif juga berperan dalam memastikan bahwa penggunaan dana BOS benar-benar sesuai dengan perencanaan. Misalnya, ketika terjadi perubahan kebutuhan mendadak yang memerlukan revisi anggaran, pendamping membantu sekolah untuk melakukan penyesuaian tanpa melanggar aturan yang berlaku. Hal ini meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah tanpa mengorbankan aspek kepatuhan terhadap regulasi.



Gambar 2. Pendampingan Intensif Pengelolaan Dana BOS Sesuai aturan Perundang-undangan

d. Monitoring dan Evaluasi (M&E)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penggunaan dana BOS di SMKN Klakah. Monitoring dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator keberhasilan, seperti efisiensi pengeluaran,

kepatuhan terhadap jadwal pelaporan, dan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan.

Dari hasil monitoring, ditemukan bahwa SMKN Klakah berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan dana BOS, yang tercermin dari pengurangan biaya-biaya yang tidak penting dan peningkatan alokasi dana untuk kebutuhan yang mendukung kualitas pendidikan. Evaluasi juga menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam hal kepatuhan terhadap jadwal pelaporan, di mana sekolah mampu menyelesaikan laporan tepat waktu dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

4. KESIMPULAN

Penerapan metode pendampingan yang komprehensif di SMKN Klakah Lumajang telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan dana BOS. Pendekatan partisipatif meningkatkan keterlibatan semua pihak, sementara pelatihan dan workshop memperkuat kapasitas manajemen keuangan sekolah. Pendampingan intensif, monitoring dan evaluasi yang konsisten, serta penelitian tindakan telah memastikan bahwa dana BOS dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi pendampingan yang terstruktur dapat menjadi model yang efektif untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Lumajang.

REFERENSI

- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2019). *Panduan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: BSNP.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. (2020). *Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Lumajang Tahun 2019/2020*. Lumajang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2018). *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fauziah, S., & Marjohan, J. (2018). Implementasi Dana BOS: Studi Kasus di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(2), 147-156.
- Ghozali, I. (2016). *Manajemen Keuangan Sekolah Berbasis Dana BOS*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, R., & Suyatno, S. (2019). Pengaruh Pelatihan Terhadap Peningkatan Kompetensi Manajemen Keuangan Kepala Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(3), 201-213.
- Kusumastuti, E., & Widyaningsih, R. (2020). Efektivitas Pendampingan dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 12(1), 56-67.
- Puspitasari, D. (2017). Pengaruh Pendampingan Pengelolaan Dana BOS terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Sekolah. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 5(2), 103-112.
- Suryani, R., & Riyadi, R. (2021). Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(4), 89-98.
- Widodo, S. (2018). Strategi Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Sekolah*, 10(2), 77-85..